

Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Jatim Park 2 di Kota Batu

Gathan Bryan Tama¹, Alpha Raphael Ariwan², Fachrillah Dhinul Hakiki³, Toriq Nizar Fadillah⁴, Jose Mario Keivan Widiono⁵, Prisca Kiki Wulandari⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya

Email: gathanbryant@student.ub.ac.id

Corresponding Author: Yacob Ruru, e-mail: yacobruru62@gmail.com

Published: June, 2025

ABSTRAK

Pembangunan sektor pariwisata di tingkat daerah saat ini dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari isu keberlanjutan lingkungan, keterbatasan sumber daya, hingga tuntutan akan pelayanan publik yang inklusif. Dalam situasi tersebut, pendekatan *collaborative governance* menjadi strategi yang relevan karena mampu mengintegrasikan peran berbagai aktor lintas sektor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Jatim Park sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Batu, Jawa Timur, serta menganalisis tantangan yang muncul dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Jatim Park tidak lepas dari sinergi antar aktor yang terlibat. Namun, kolaborasi ini juga menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan akses sumber daya dan perbedaan kepentingan. Penelitian ini menekankan pentingnya komitmen bersama, kepercayaan antar pihak, serta peran aktif pemerintah sebagai fasilitator dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *collaborative governance*, Jatim Park, pariwisata daerah, kota batu, partisipasi masyarakat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Keberadaan sektor ini dinilai mampu menggerakkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan identitas dan pelestarian budaya lokal (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020). Tidak mengherankan apabila hampir seluruh daerah otonom di Indonesia berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi wisata yang mereka miliki, baik dengan mengoptimalkan kekayaan alam dan budaya yang sudah tersedia, maupun melalui pembangunan destinasi baru yang dirancang secara kreatif dan inovatif guna menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara (Firman & Winarno, 2021). Pembangunan pariwisata bukan semata-mata soal menambah jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat melalui akses terhadap peluang ekonomi dan sosial. Sektor ini turut memberikan kontribusi dalam memperkuat jati diri suatu daerah, menjaga

kearifan lokal, serta membangun rasa bangga terhadap warisan budaya yang dimiliki (Putra, 2020). Saat ini, pengembangan sektor pariwisata tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks, seperti isu keberlanjutan lingkungan, keterbatasan sumber daya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang lebih baik, menjadikan keterlibatan berbagai aktor di luar pemerintah sebagai kebutuhan yang mendesak (Ansell & Gash, 2008).

Penerapan *collaborative governance* menjadi sangat relevan dalam pembangunan sektor pariwisata yang secara inheren melibatkan banyak kepentingan lintas sektor. Pengembangan destinasi wisata menuntut tersedianya infrastruktur yang memadai, sistem promosi yang terkoordinasi, kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat, serta penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama. Semua aspek ini tidak mungkin dicapai secara optimal jika hanya bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu contoh konkret penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata daerah dapat dilihat dari keberhasilan destinasi wisata Jatim Park yang berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Jatim Park merupakan destinasi unggulan yang telah menarik perhatian luas, tidak hanya dari masyarakat Malang Raya, tetapi juga dari berbagai daerah lain di Jawa Timur bahkan luar provinsi. Keberhasilan Jatim Park sebagai magnet wisata tidak lepas dari sinergi antara sektor swasta, dalam hal ini PT Bunga Wangsa Sedjati sebagai pengelola utama, dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu dampak dari adanya konsep *collaborative governance*, model pengembangan Jatim Park kini telah menjadi rujukan dalam proyek pengembangan wisata di daerah lain (Hadna, 2016). Salah satu contohnya adalah proyek Bakauheni Harbour City di Lampung, yang mengadopsi pendekatan terpadu antara wisata, transportasi, dan budaya lokal sebagaimana diterapkan di Jatim Park. Menariknya, proyek ini juga melibatkan kerja sama lintas provinsi antara Pemerintah Lampung dan Pemerintah Jawa Timur, yang menunjukkan bagaimana praktik *collaborative governance* dapat melintasi batas administrasi daerah demi pembangunan bersama. Menurut jurnal berjudul *The Development of Bakauheni Harbour City Integrated Tourism Area as an International Tourist Destination* oleh Astiwi Inayah dkk (2023), Fenomena ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata terbukti efektif dalam menciptakan nilai tambah yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya (Inayah et al., 2023). Melalui pelibatan berbagai pihak secara aktif, pembangunan destinasi wisata dapat berlangsung secara lebih demokratis, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, penerapan *collaborative governance* tentu tidak lepas dari tantangan. Perbedaan kepentingan antar aktor, kurangnya komunikasi, ketimpangan sumber daya, hingga resistensi terhadap perubahan menjadi beberapa hambatan yang perlu diantisipasi (Fitriani & Amri, 2022). Dalam hal ini, kemampuan pemerintah sebagai fasilitator, serta kesiapan semua pihak untuk membuka ruang dialog dan membangun kepercayaan menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi (Hadna, 2016). Pandangan ini sangat sesuai

dengan dinamika pembangunan pariwisata di Kota Batu, khususnya pada pengembangan Jatim Park yang melibatkan banyak *stakeholder* dari berbagai latar belakang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, serta menganalisis secara komprehensif bentuk serta mekanisme adanya *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif yang terbangun antara berbagai aktor kunci, seperti lembaga pemerintah daerah, pengelola kawasan wisata yaitu Jawa Timur Park 2, sektor swasta, serta masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengimplementasian kawasan Jawa Timur Park 2 di Kota Batu. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pembangunan pariwisata di daerah Jawa Timur Park 2 di Kota Batu.

Kajian Literatur

Penelitian yang dilakukan oleh Kedasi Silayar, dkk., (2021) yang berjudul “*Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Sula*” digunakan sebagai rujukan penelitian ini yang bertujuan untuk memahami bagaimana konsep *Collaborative Governance*” diterapkan dalam pengelolaan sektor pariwisata di suatu daerah. Menurut G. Edward DeSeve dalam bukunya yang berjudul “*The Future of Agile Government: Driving Innovation, Efficiency, and Customer-Centricity*” tahun 2018, pendekatan *collaborative governance* menekankan integrasi lintas organisasi dan pentingnya pengelolaan hubungan yang kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama dalam pemerintahan. DeSeve juga mengembangkan konsep *Integrated Agile Framework for Action* yang membantu pemimpin pemerintahan menerapkan prinsip kolaborasi dan lincah dalam pelayanan publik (DeSeve, 2018).

Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh G. Edward DeSeve (2018), menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi pemerintahan bergantung pada delapan dimensi utama yang harus diperhatikan dalam membangun sistem tata kelola yang efektif. Kedelapan dimensi tersebut adalah :

- a. *Network Structure*, yaitu kolaborasi pemerintahan harus membentuk jaringan yang inklusif, di mana semua pemangku kepentingan dapat berpartisipasi aktif tanpa adanya sistem hierarki yang terlalu kaku.
- b. *Commitment to a Common Purpose*, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus memiliki tujuan yang jelas dan kesamaan visi dalam mencapai kepentingan publik, sehingga tercipta koordinasi yang solid.
- c. *Trust Among the Participants*, yaitu kepercayaan menjadi elemen penting dalam menjaga kelancaran komunikasi dan kerjasama antar pihak. Kepercayaan ini terbentuk melalui hubungan profesional dan transparansi informasi.
- d. *Governance*, yaitu struktur dan regulasi dalam kolaborasi harus jelas, termasuk definisi mengenai siapa saja yang terlibat, bagaimana pengambilan keputusan dilakukan, serta aturan yang memastikan kelangsungan kerja sama.

- e. *Access to Authority*, yaitu *stakeholders* harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai peran, wewenang, dan standar kebijakan yang digunakan dalam kolaborasi pemerintahan, sehingga setiap keputusan yang dibuat bisa diterima secara luas.
- f. *Distributive Accountability*, yaitu pembagian tanggung jawab harus jelas di antara para pemangku kepentingan, sehingga setiap pihak mengetahui kewajiban mereka dalam menjalankan tugas kolaboratif.
- g. *Information Sharing*, yaitu pertukaran informasi harus terbuka dan efektif, dengan adanya sistem komunikasi yang memudahkan akses bagi semua pihak yang terlibat.
- h. *Access to Resources*, yaitu, ketersediaan sumber daya, baik itu dana, tenaga kerja, maupun akses teknologi, menjadi faktor krusial dalam keberhasilan kolaborasi pemerintahan.

Teori ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga memberikan pedoman yang sistematis untuk memastikan bahwa kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat berlangsung secara efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada kemampuan setiap aktor untuk berinteraksi dalam suatu jaringan tata kelola yang saling mendukung dan transparan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan *collaborative governance* dalam pembangunan pariwisata di Jatim Park, Kota Batu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan proses, dinamika, serta interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata berbasis kolaborasi. Studi kasus difokuskan pada Jatim Park 2 sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Batu, yang dikelola oleh Jatim Park Group. Kota ini telah menjadi salah satu kota yang mengembangkan ekonominya melalui pariwisata. Dalam situasi seperti ini, keberadaan Jatim Park sebagai lokasi wisata yang menawarkan berbagai edukasi dan rekreasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan hubungan kerja sama antara berbagai kelompok.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh wawasan yang kaya mengenai pandangan, pengalaman, sikap, dan persepsi para narasumber terkait penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Jatim Park 2. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan dan melakukan sesi tanya jawab secara langsung, sehingga informasi yang diperoleh bersifat lebih mendalam dibandingkan metode survei biasa. Berikut tabel informan dalam penelitian ini :

No	Nama	Jenis Kelamin	Peran
1.	Margaretha Cornelia Tri Ari Suci	Perempuan	<i>Human Resources Department (HRD) Jatim Park 2</i>
2.	Adyatama	Laki - laki	Kepala Bagian Destinasi Dinas Pariwisata Kota Batu

Tabel 1.1 Tabel Informan

Informan dalam penelitian ini adalah *Human Resources Department (HRD) Jatim Park 2* dan perwakilan Dinas Kebudayaan Kota Batu. Melalui wawancara tersebut, peneliti berupaya menggali informasi mengenai model jejaring dan kerja sama antara kedua pihak dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan Jatim Park 2 dan memiliki pengetahuan tentang kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mereka juga bersedia memberikan informasi lengkap terkait pengembangan pariwisata di Kota Batu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktor dalam Skema Collaborative Governance: Dinas Pariwisata Kota Batu dan Jatim Park 2

Dalam kerangka pembangunan pariwisata berbasis tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*), peran Dinas Pariwisata Kota Batu dapat dikategorikan sebagai fasilitator kebijakan dan penghubung antar aktor. Meski tidak memberikan dukungan finansial langsung kepada Jatim Park 2 sebagai pelaku wisata skala besar, peran dinas cukup strategis dalam menciptakan ekosistem pendukung, seperti penyediaan regulasi, perizinan, pelatihan teknis, serta pemantauan berkala terhadap kualitas layanan pariwisata. Peran ini tidak bersifat intervensi, melainkan menekankan pada penguatan fungsi pelayanan publik dan pengawasan non-struktural. Dari aspek promosi, Dinas memanfaatkan kanal media sosial resmi untuk memperluas eksposur destinasi wisata, sekaligus membangun citra Kota Batu sebagai kota wisata nasional.

Komitmen terhadap masyarakat lokal juga terlihat melalui kebijakan afirmatif dalam proses perekrutan tenaga kerja di Jatim Park 2. Dinas mendorong agar pelamar dari warga sekitar mendapat perhatian khusus dalam penilaian, sebagai upaya memastikan pemerataan manfaat ekonomi. Selain itu, keberadaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di area wisata juga difasilitasi untuk berkontribusi dalam rantai ekonomi wisata. Dalam menyikapi potensi konflik antar aktor, Dinas Pariwisata mengusung pendekatan berbasis visi bersama, yaitu membangun Kota Batu sebagai kota wisata unggulan yang mengedepankan nilai-nilai Sapta Pesona. Sementara itu, Jatim Park 2, yang merupakan bagian dari Jatim Park Group, berperan sebagai penggerak utama pengembangan wisata berbasis konservasi. Selain sebagai destinasi rekreasi edukatif, Jatim Park 2 juga mengemban tanggung jawab

sebagai lembaga konservasi yang terakreditasi nasional dan regional Asia Tenggara. Kolaborasinya dengan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan fasilitas wisata sehat dan penyusunan laporan tahunan, menunjukkan bentuk partisipasi aktif dan akuntabel dalam mendukung tata kelola pariwisata.

Pada masa pandemi COVID-19, Jatim Park 2 memperlihatkan ketahanan institusional melalui langkah-langkah strategis seperti negosiasi tiket, koordinasi operasional dengan dinas, serta penggalangan bantuan dari komunitas pecinta hewan. Dalam kondisi krisis, relasi antara dinas dan pengelola semakin erat melalui percepatan izin operasional dan asistensi regulatif yang mempercepat pemulihan aktivitas pariwisata.

Analisis Berdasarkan Delapan Dimensi Collaborative Governance oleh G. Edward DeSeve

Dalam dimensi pertama, *Network Structure*, bentuk jejaring kolaboratif yang dibangun antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Jatim Park 2 menunjukkan pola hubungan yang cenderung horizontal dan inklusif.

“Kami aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga menjadi anggota organisasi kebun binatang Asia Tenggara. Keanggotaan ini memperluas akses informasi dan sumber daya, serta memperkuat posisi kami sebagai bagian dari proyek nasional yang penting.” Wawancara dengan Ibu Margaretha Cornelia Tri Ari Suci, *Human Resources Department* Jatim Park 2 pada tanggal 28 April 2025.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata memfasilitasi forum komunikasi lintas instansi melalui grup WhatsApp “Batu Nyaman” serta pertemuan mingguan, terutama pada masa *high season* guna mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan. Meski komunikasi berjalan lancar, keterbatasan struktur kelembagaan formal yang permanen masih menjadi kelemahan utama. Belum adanya forum kolaboratif yang terdokumentasi atau sekretariat tetap membuat jaringan ini sangat bergantung pada personel dan relasi informal, yang bisa melemah seiring dengan pergantian kepemimpinan.

Dalam dimensi *Commitment to a Common Purpose*, kolaborasi antara dua aktor utama ini dilandasi oleh kesamaan visi menjadikan Kota Batu sebagai destinasi wisata nasional berbasis edukasi dan konservasi.

“Visi kami sejalan dengan upaya menjadikan Kota Batu sebagai destinasi wisata edukatif dan berbasis konservasi. Kami berkomitmen terhadap konservasi satwa dan pendidikan lingkungan, salah satunya dengan menjalani akreditasi secara berkala dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional, fasilitas yang kami kembangkan, seperti ruang laktasi dan zona bebas rokok, adalah bentuk komitmen kami untuk menciptakan wisata yang sehat dan ramah bagi keluarga.” Wawancara dengan Ibu Margaretha Cornelia Tri Ari Suci, *Human Resources Department* Jatim Park 2 pada tanggal 28 April 2025.

Jatim Park 2 menegaskan komitmen mereka terhadap konservasi satwa dan pendidikan lingkungan melalui akreditasi berkala dan kepatuhan terhadap standar internasional. Dinas Pariwisata mendukung komitmen tersebut melalui promosi, pengumpulan data kunjungan wisatawan, dan keterlibatan dalam forum internasional seperti *Tourism Promotion Organization* (TPO). Namun, pihak dinas juga mengakui bahwa peran mereka masih bersifat reaktif dan administratif, belum sepenuhnya masuk

dalam proses perencanaan strategis jangka panjang. Ini menunjukkan masih terbatasnya internalisasi visi bersama dalam perumusan kebijakan kolaboratif yang menyeluruh.

Dimensi ketiga, *Trust Among the Participants*, merupakan pondasi utama dalam menjalin kerja sama lintas sektor.

“Kepercayaan itu kami bangun lewat monitoring rutin, evaluasi kualitas pelayanan wisata, dan juga survei kepuasan pengunjung. Itu penting untuk memastikan semua pelaku wisata tetap menjaga standar layanan. Selain itu, keterbukaan data dari pihak swasta, seperti Jatim Park 2 yang rutin melaporkan jumlah pengunjung, sangat membantu kami dalam perencanaan dan evaluasi.” Wawancara dengan Bapak Adyatama, Dinas Pariwisata Kota Batu pada tanggal 2 Mei 2025.

Dinas Pariwisata menekankan peran monitoring, evaluasi kualitas layanan, dan pelaksanaan survei kepuasan sebagai instrumen pembangunan kepercayaan. Jatim Park 2 juga menunjukkan transparansi dengan secara aktif melaporkan jumlah pengunjung harian kepada Dinas. Walaupun hubungan ini sudah dilandasi oleh rasa saling percaya dalam aspek operasional, kepercayaan strategis yang mencakup pengambilan keputusan bersama masih belum terlihat. Ketidakhadiran *joint decision-making body* mengindikasikan bahwa kerja sama berjalan lebih sebagai hubungan koordinatif ketimbang kolaboratif yang setara.

Selanjutnya, dimensi *Governance*, menjadi titik krusial yang mempengaruhi keberlangsungan kolaborasi. Terungkap bahwa belum terdapat nota kesepahaman (MoU) atau struktur hukum yang mengatur kerja sama secara tertulis.

“Memang belum ada MoU tertulis, tapi selama ini kami berjalan berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan di lapangan.” Wawancara dengan Bapak Adyatama, Dinas Pariwisata Kota Batu pada tanggal 2 Mei 2025.

Praktik kerja sama hanya berlandaskan kebiasaan dan kebutuhan lapangan. Ketidakterikatan pada dokumen legal membuat struktur tata kelola menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan apabila terjadi perubahan kebijakan atau kepemimpinan di salah satu pihak.

Pada dimensi *Access to Authority*, merujuk pada mekanisme komunikasi rutin yang dilakukan oleh Jatim Park 2 bersama pemangku kepentingan lain seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui grup komunikasi, semua pihak mengetahui kewenangan masing-masing, namun Dinas Pariwisata mengakui bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengintervensi kebijakan internal Jatim Park, misalnya dalam penentuan strategi bisnis atau pengelolaan operasional harian.

“Kami rutin koordinasi lewat grup bersama TNI dan Polri, tapi kami nggak bisa ikut campur soal kebijakan internal Jatim Park, itu murni urusan manajemen mereka.” Wawancara dengan Bapak Adyatama, Dinas Pariwisata Kota Batu pada tanggal 2 Mei 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pembagian otoritas secara proporsional yang memungkinkan pemerintah untuk bertindak sebagai co-creator dalam pengambilan keputusan strategis.

Dimensi keenam, *Distributive Accountability* (Akuntabilitas yang Terdistribusi), dieksplorasi melalui pertanyaan mengenai pembagian tanggung jawab. Dinas Pariwisata menyatakan bahwa

“Setiap stakeholder memiliki sistem pertanggungjawaban masing-masing.” Wawancara dengan Bapak Adyatama, Dinas Pariwisata Kota Batu pada tanggal 2 Mei 2025

Dinas bertugas mengevaluasi performa wisata daerah, sedangkan Jatim Park 2 menjalani audit konservasi dari lembaga nasional. Meski terdapat sistem akuntabilitas di masing-masing institusi, tidak ditemukan mekanisme pelaporan gabungan atau evaluasi lintas sektor yang menyatukan indikator keberhasilan. Hal ini menyulitkan pengukuran efektivitas kolaborasi secara menyeluruh dan objektif.

Dalam aspek *Information Sharing*, para aktor berpendapat sama bahwa penggunaan grup WhatsApp dan pelaporan manual sebagai media komunikasi harian. Kendati cukup efisien untuk komunikasi cepat, ketidakhadiran sistem informasi berbasis digital seperti *dashboard pariwisata Kota Batu* menyebabkan informasi tidak terdokumentasi secara sistematis. Ketergantungan pada komunikasi informal berisiko menimbulkan *information gap* saat terjadi perubahan struktur personel.

Terakhir, pada dimensi *Access to Resources*, Dinas Pariwisata berharap tempat wisata berskala besar seperti Jatim Park dapat menyalurkan manfaat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat sekitar. Namun, Jatim Park 2 mengakui bahwa dampak langsung terhadap masyarakat lokal cukup terbatas karena letak geografis yang tidak bersebelahan langsung dengan pemukiman warga. Di sisi lain, Dinas Pariwisata juga menghadapi tantangan dari sisi kapasitas, seperti kekurangan tenaga ahli, akses teknologi, dan minimnya pendanaan untuk pelatihan atau pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ketimpangan sumber daya antara aktor publik dan swasta inilah yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan kolaborasi yang adil dan berimbang.

KESIMPULAN

Jatim Park 2 merupakan destinasi wisata yang berhasil memadukan fungsi rekreasi dan edukasi secara sinergis, menjadikannya tempat yang bernilai tambah bagi pengunjung, terutama pelajar dan keluarga. Keberhasilan pengembangan Jatim Park 2 tidak terlepas dari penerapan model *collaborative governance* yang melibatkan tiga unsur utama: sektor swasta sebagai pengelola utama, pemerintah daerah sebagai fasilitator kebijakan, serta masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi mikro. Meskipun dikelola secara mandiri oleh swasta, peran Pemerintah Kota Batu tetap berjalan melalui fungsi regulasi, monitoring, dukungan promosi, pelatihan teknis, dan sertifikasi layanan.

Komitmen terhadap konservasi, penerapan standar pelayanan berkualitas, serta terbentuknya sistem komunikasi terbuka menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas kolaborasi. Hubungan kerja sama Jatim Park 2 dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional juga mencerminkan kapasitas lembaga ini dalam menjaga reputasi dan adaptasi terhadap dinamika global. Jika ditinjau berdasarkan

delapan dimensi *collaborative governance* menurut Edward DeSeve, hubungan antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Jatim Park 2 telah menunjukkan bentuk kerja sama yang adaptif, komunikatif, dan cukup stabil dalam aspek operasional teknis.

Namun demikian, beberapa aspek kelembagaan strategis masih perlu diperkuat. Ketiadaan kerangka kerja formal seperti perjanjian tertulis, belum terbangunnya sistem informasi terpadu, serta ketimpangan dalam hal kapasitas sumber daya antara pihak pemerintah dan swasta menjadi tantangan utama. Hubungan yang terjalin sejauh ini lebih mencerminkan model koordinasi administratif daripada kemitraan strategis yang bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kelembagaan, pemerataan akses terhadap sumber daya, dan pembangunan sistem informasi bersama menjadi langkah penting dalam mengembangkan kolaborasi menuju arah yang lebih integratif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhita, C., Kirana, D., & Artisa, R. A. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu*. 6(1).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- DeSeve, E. (2018). *The Future of Agile Government: Driving Innovation, Efficiency, and Customer-Centricity*. IBM Center for The Business of Government.
- Fitriani, Y., & Amri, A. (2022). Public–Private Collaboration in Sustainable Tourism: A Case Study of Indonesian Tourist Villages. *Journal of Regional Development*, 14(2), 130–145. <https://doi.org/10.21580/jrd.2022.14.2.10834>
- Inayah, A., Hadiawan, A., & Aprilia, H. D. (2023). *The Development of Bakaubeni Harbour City Integrated Tourism Area as an International Tourist Destination*. IICIS 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2023.2343317>
- Putu Nomy Yasintha. (2020). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN GLANYAR*. 4.
- Pebriana, F. (2021). Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)* Vol. 1 No. 1, 11-22.
- Silayar, K., Sartika, I., & Mulyati, D. (2021). *TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA*. 6. <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Yahya, A. S., Wardhono, H., & Haryanti, E. (2023). *Pengembangan Omah Wisata Dalam Perspektif Collaborative Governance Di kota Batu*. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 535-550. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7306/3437>
- Jeryn Anggitasari, M. A. (2023). Analisis Jejaring Kebijakan dalam Pengembangan Wisata Bahari-Religi di Pantai Ngobaran Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Public and Administration Reseach* Vol. 8 No. 6.
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 4 No. 1. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2219>